JADMENT: *Journal of Administration & Development*
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 606-612
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA SUMBERBRANTAS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU

Evaluation of Tourism Village Development Policy in Sumberbrantas Village Bumiaji District Batu City

Ardinsus Grinaldi Kanda[1*]
Annisa Purwatiningsih[1]
Ronny Ersya Novianto Putra[1]

[1]Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang

[*]corresponding author:
ardinsusgrinaldikanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa Sumberbrantas, Direktur BUMDes, Kasi Pelayanan, pelaku usaha, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berlandaskan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 ini telah berjalan sejak 2021 dengan capaian awal meningkatnya PAD. Berdasarkan William Dunn pada enam kriteria evaluasi kebijakan (1) efektivitas belum optimal akibat hambatan infrastruktur, promosi digital lemah, dan keterbatasan SDM; (2) efisiensi rendah karena Dana Desa harus dibagi untuk berbagai kebutuhan dan SDM merangkap tugas; (3) kecukupan belum memadai karena fasilitas terbatas pada level operasional dasar; (4) pemerataan belum tercapai karena manfaat ekonomi terpusat pada warga sekitar kawasan Brakseng; (5) responsivitas cukup pada tahap perencanaan namun lambat dalam implementasi; dan (6) ketepatan kebijakan sudah sesuai potensi desa namun belum optimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci:
Evaluasi kebijakan
Kriteria Dunn
Desa Wisata
Desa Sumberbrantas

Keywords:
Policy evaluation
William Dunn's Criteria
Tourism Village
Sumberbrantas Village

Abstract

(This study aims to evaluate the development policy of Brakseng Tourism Village in Sumberbrantas Village, Bumiaji District, Batu City. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation of the Head of Sumberbrantas Village, Director of BUMDes, Head of Service Section, business actors, and tourists. The results of the study indicate that the policy based on Village Regulation Number 5 of 2021 has been implemented since 2021 with initial achievements of increasing PAD. Based on William Dunn on six policy evaluation criteria (1) effectiveness is not optimal due to infrastructure constraints, weak digital promotion, and limited human resources; (2) low efficiency because Village Funds must be divided for various needs and human resources are concurrently tasked; (3) sufficiency is not adequate because facilities are limited at the basic operational level; (4) equality has not been achieved because economic benefits are concentrated on residents around the Brakseng area; (5) responsiveness is sufficient in the planning stage but slow in implementation; and (6) the accuracy of the policy is in accordance with the village's potential but is not optimal in its implementation.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index

Submite: 10-07-2026 *Accepted: 18-08-2026* *Published: 20-11-2026*

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata di Indonesia telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong perekonomian lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, menempatkan desa-desa di wilayahnya sebagai potensi wisata alternatif yang perlu dikembangkan secara terstruktur dan evaluatif.

Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata

alam luar biasa, meliputi kawasan Brakseng, hamparan kebun sayur, dan mata air Sungai Brantas. Sejak ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Kaki Langit, program pengembangan desa wisata ini mulai dijalankan dengan BUMDes sebagai pelaksana operasional utama. Dalam empat bulan pertama operasionalisasi, Wisata Alam Brakseng berhasil membukukan PAD sekitar Rp 17 juta , sebuah capaian awal yang menjanjikan.

Namun demikian, keberhasilan awal tersebut belum diiringi dengan evaluasi yang sistematis dan komprehensif. Berbagai persoalan di lapangan seperti kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), lemahnya promosi digital, dan distribusi manfaat yang belum merata menunjukkan bahwa kebijakan ini membutuhkan kajian evaluatif yang mendalam. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana program telah berjalan sesuai tujuan dan mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang perlu diperbaiki (Dunn, 1994).

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran evaluatif yang menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Sumberbrantas sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis data lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan keterlibatan langsung informan dalam program desa wisata. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa Sumberbrantas (Saniman),kasi Pelayanan (Ari Handayani, SP) Direktur BUMDes (Mahzudi), pelaku usaha Café Sawang Alam (Rian Juno), dan wisatawan (Askhiya Gabbriel Nono dan Amanda).

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sementara sumber data sekunder diperoleh dari observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menjamin keabsahan data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Enam Kriteria Dunn

William N. Dunn (1994) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan penyediaan informasi mengenai hasil dan dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. Evaluasi kebijakan adalah penilaian sistematis terhadap rancangan, implementasi dan dampak suatu program untuk menilai keberhasilan serta merumuskan perbaikan. Dunn (1994) mengajukan enam kriteria evaluasi: efektivitas (sejauh mana tujuan tercapai), efisiensi (perbandingan antara hasil dan biaya), kecukupan (adanya perbandingan antara outcome dengan kebutuhan), pemerataan (kesetaraan dalam distribusi manfaat), responsivitas (sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat), dan ketepatan (tingkat keberhasilan memecahkan masalah). Dalam penelitian ini, kriteria Dunn digunakan untuk menilai hasil kebijakan pengembangan desa wisata Sumberbrantas dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan suatu kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa terdapat enam kriteria yang

digunakan dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan lebih dalam, Dunn menekankan bahwa evaluasi tidak hanya tentang mengukur hasil, tetapi juga menganalisis hubungan sebab-akibat antara masukan, proses, dan hasil. Contohnya, dalam pengembangan desa wisata, evaluasi proses bisa menemukan hambatan seperti kurangnya kerja sama antarinstansi, sementara evaluasi hasil mengukur peningkatan pendapatan desa atau jumlah pengunjung.

Evaluasi Menggunakan Enam Indikator Dunn

Efektivitas

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, efektivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengembangan Desa Wisata Brakseng adalah meningkatkan kunjungan wisatawan secara berkelanjutan, mendorong manfaat ekonomi bagi warga, dan mewujudkan kemandirian finansial desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian awal program sudah ada ditandai dengan beroperasinya destinasi sejak 2021, adanya PAD, dan meningkatnya minat wisatawan pada waktu tertentu. Namun capaian ini belum stabil karena akses jalan masih rusak, promosi digital lemah, dan fasilitas serta SDM terbatas.

Kepala Desa Saniman menegaskan bahwa: "Kunjungan wisatawan sudah mulai berjalan setiap hari, tapi masih belum stabil dan belum konsisten. PAD sudah ada sekitar Rp 17 juta dalam empat bulan, tapi target jangka panjang belum optimal karena promosi digital masih lemah dan jalan masih rusak." Sementara Direktur BUMDes Mahzudi Menyampaikan: "BUMDes sudah mengoperasikan tiket dan café, tapi kunjungan belum stabil karena promosi digital tidak konsisten dan tidak ada tenaga khusus untuk itu."

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menghasilkan dampak awal yang positif, namun belum mampu menciptakan perubahan yang kuat, berkelanjutan, dan konsisten. Menurut Dunn (1994), kebijakan disebut efektif bila output dan outcome benar-benar mengarah secara konsisten pada tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng masuk dalam kategori cukup efektif namun belum optimal.





Sumber: Dokumentasi penelitian, 2025

Dokumentasi penelitian di atas menunjukkan bahwa efektifitas wisata brakseng memiliki daya tarik yang berupa panorama alam yang indah serta suasan yang nyaman, sehingga mampu manrika para wisatawan.

Efesiensi: Efisiensi dalam perspektif Dunn (1994) menilai seberapa besar usaha, biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil kebijakan. Kebijakan dikatakan efisien bila tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal atau paling optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan Desa Wisata Sumberbrantas masih rendah. Dana Desa sebagai satu-satunya sumber pembiayaan tidak dapat difokuskan sepenuhnya untuk wisata karena harus dibagi untuk infrastruktur umum dan program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, SDM pengelola BUMDes masih merangkap banyak tugas tanpa pembagian kerja yang jelas. Direktur BUMDes Mahzudi menyatakan: "Pengelola BUMDes merangkap banyak fungsi tanpa spesialisasi yang jelas. Tidak adanya tenaga khusus konten digital menyebabkan pengelolaan media sosial tidak konsisten."

Pelaku usaha Rian Juno memperkuat temuan ini: sistem bagi hasil yang berjalan terganggu fluktuasi pengunjung yang tidak menentu, membuat efisiensi stok dan tenaga kerja menjadi sulit dikelola. Sari dan Wulandari (2020)

menemukan pola serupa dalam evaluasi Desa Wisata Pujon Kidul, di mana efisiensi program cenderung rendah ketika sumber pendanaan hanya bergantung pada satu sumber tanpa diversifikasi. Secara keseluruhan, efisiensi kebijakan ini dinilai rendah sumber daya yang tersedia belum menghasilkan output yang proporsional dengan potensi yang dimiliki.

Kecukupan : Kecukupan dalam kerangka Dunn (1994) menilai apakah hasil kebijakan sudah mampu memenuhi kebutuhan, masalah, dan harapan masyarakat secara memadai bukan sekadar menghasilkan sesuatu, tetapi hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Brakseng sudah memiliki fasilitas dasar yang memungkinkan kegiatan wisata berjalan pada level minimum. Fasilitas yang ada meliputi loket tiket masuk, Café Sawang Alam, Teras Tegal, dan petugas harian. Namun demikian, jalan menuju Brakseng masih rusak di beberapa titik, Dana Desa belum cukup untuk membangun seluruh fasilitas yang dibutuhkan, dan PAD wisata belum mampu mewujudkan kemandirian finansial desa.

Kepala Desa Saniman mengakui: "Infrastruktur jalan menuju Brakseng masih rusak di beberapa titik. Dana wisata dari Dana Desa tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengembangan fasilitas." Pelaku usaha Rian Juno menegaskan: "Jalan yang masih rusak bikin sebagian pengunjung malas balik lagi. Kalau fasilitasnya diperbaiki, saya yakin dampaknya bisa lebih besar buat kami semua." Butler (1980) dalam konsep Tourism Area Life Cycle menjelaskan bahwa destinasi pada fase pengembangan memerlukan investasi infrastruktur yang konsisten agar tidak mengalami stagnasi. Dengan demikian, kecukupan kebijakan ini masih belum memadai untuk menjawab kebutuhan pengembangan jangka panjang.




Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Berdasarkan dokumentasi di atas bahwa memang benar bahwa kondisi jalan menuju wisata brakseng belum memadai sehingga menjadi kendala para wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut.

Pemerataan : Pemerataan dalam perspektif Dunn (1994) menilai apakah manfaat kebijakan tersebar secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Kebijakan yang baik tidak hanya menghasilkan manfaat, tetapi juga memastikan manfaat tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari Desa Wisata Brakseng masih terkonsentrasi pada warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata atau yang memiliki usaha langsung di lokasi. Warga di dusun-dusun lain seperti Dusun Jurang Kuali, Krajan, dan Lemah Putih belum merasakan dampak ekonomi yang signifikan.

Direktur BUMDes Mahzudi mengungkapkan: "BUMDes telah melibatkan warga desa sebagai SDM operasional harian, namun distribusi manfaat ekonomi langsung masih terpusat pada warga yang terlibat langsung. Sampai saat ini belum ada program untuk memperluas keterlibatan warga dari dusun yang lebih jauh." Pelaku usaha Rian Juno berharap adanya program pelatihan oleh-oleh, homestay komunitas, atau paket wisata berbasis masyarakat yang dapat memperluas jangkauan manfaat. Turner (2003) menekankan bahwa kemitraan publik-swasta dalam pariwisata inklusif adalah kunci untuk menciptakan multiplier effect yang menjangkau komunitas secara luas. Dengan demikian, pemerataan manfaat kebijakan ini dinilai masih rendah karena belum

dirancang secara inklusif untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

Resposivitas :Responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat serta pihak yang terdampak (Dunn, 1994). Kebijakan yang responsif tidak hanya mengenali masalah tetapi juga segera menindaklanjutinya secara nyata.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menunjukkan responsivitas yang cukup baik dengan menetapkan Brakseng sebagai destinasi utama berdasarkan kesepakatan musyawarah desa. BUMDes juga mulai membuka ruang bagi pemuda yang memiliki kemampuan digital untuk terlibat dalam pengelolaan media sosial. Kepala Desa Saniman menyatakan: "Keputusan menjadikan Brakseng sebagai destinasi utama merupakan hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan respons terhadap kebutuhan dan potensi yang ada."

Namun dalam implementasi, responsivitas masih lemah. Keluhan utama wisatawan dan pelaku usaha terkait kerusakan jalan belum ditangani secara efektif karena bergantung pada koordinasi dengan Dinas PU Kota Batu. Wisatawan Askhiya Gabbriel Nono menyatakan: "Brakseng bagus dan unik, tapi informasi di internet sangat sedikit dan jalannya kurang nyaman." Pelaku usaha Rian Juno menambahkan: "Saya sering mendengar keluhan wisatawan tentang kondisi jalan yang rusak dan saya menyampaikan harapan kepada pemerintah desa, namun responsivitas pemerintah desa masih lambat." Secara keseluruhan, responsivitas kebijakan ini dinilai cukup pada tahap perencanaan namun belum memadai pada tahap implementasi.

Ketepatan : Ketepatan dalam kerangka Dunn (1994) menilai apakah kebijakan sudah sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan serta tepat dalam memilih sasaran, strategi, dan pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Desa Wisata Sumberbrantas sudah tepat secara arah karena berangkat dari potensi yang nyata dimiliki desa, yaitu kawasan Brakseng, hamparan kebun sayur, dan mata air Sungai Brantas. Penunjukan BUMDes sebagai pelaksana operasional juga tepat secara kelembagaan karena sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengelola aset dan usaha desa.

Kepala Desa Saniman menilai: "Kebijakan pengembangan desa wisata sudah tepat sasaran karena memanfaatkan potensi alam dan pertanian desa yang memang nyata. Penunjukan BUMDes sebagai pengelola tepat karena sesuai dengan fungsi kelembagaannya." Wisatawan Amanda menambahkan: "Memanfaatkan semua itu sebagai daya tarik wisata sangat bagus dan sesuai. Tidak semua desa punya keindahan alam seperti ini, jadi potensinya memang layak dikembangkan lebih serius lagi." Namun dari sisi strategi promosi dan diversifikasi produk, kebijakan ini belum optimal promosi digital masih minim, informasi online sangat terbatas, dan paket wisata belum terdiversifikasi secara terstruktur. Kesimpulannya, ketepatan kebijakan sudah baik secara arah dan pemilihan potensi, tetapi masih perlu penguatan pada strategi promosi, inovasi produk wisata, dan pengembangan paket wisata.



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Sumberbrantas menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn dapat disimpulkan bahwa dari pertama dari dimensi efektivitas, kebijakan

pengembangan Desa Wisata Brakseng berada dalam kategori cukup efektif namun belum optimal. Capaian awal berupa PAD sebesar Rp 17 juta dalam empat bulan ini menunjukkan bahwa program telah bergerak ke arah yang benar, tetapi hambatan infrastruktur jalan, keterbatasan SDM, dan lemahnya promosi digital membuat tujuan kebijakan belum tercapai secara konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, efisiensi kebijakan masih rendah. Dana Desa sebagai satu-satunya sumber pembiayaan tidak dapat difokuskan sepenuhnya untuk wisata karena harus dibagi untuk kebutuhan lain, sementara SDM pengelola BUMDes masih merangkap tugas tanpa spesialisasi yang jelas sehingga sumber daya yang tersedia belum menghasilkan output yang proporsional.

Ketiga, kecukupan kebijakan belum memadai untuk pengembangan jangka panjang. Fasilitas yang tersedia baru memenuhi kebutuhan minimum operasional, sementara kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan dana, dan tidak adanya paket wisata inovatif membuat program belum mampu menjawab kebutuhan pengembangan wisata secara menyeluruh.

Keempat, pemerataan manfaat kebijakan masih rendah. Manfaat ekonomi masih terpusat pada warga sekitar kawasan Brakseng, sementara warga di dusun-dusun lain (Jurang Kuali, Krajan, dan Lemah Putih) belum merasakan dampak ekonomi yang signifikan karena belum ada program pemberdayaan yang inklusif dan menjangkau seluruh dusun.

Kelima, responsivitas kebijakan cukup pada tahap perencanaan namun lambat dalam implementasi. Penentuan Brakseng sebagai destinasi melalui musyawarah desa menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat, namun keluhan utama tentang kerusakan jalan belum ditangani secara efektif karena bergantung pada koordinasi lintas dinas.

Keenam, ketepatan kebijakan sudah baik secara arah dan pemilihan potensi. Pemanfaatan kawasan Brakseng, kebun sayur, dan mata air Sungai Brantas, serta penunjukan BUMDes sebagai pelaksana operasional sudah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Namun strategi promosi, diversifikasi produk wisata, dan pemanfaatan platform digital masih perlu diperkuat agar hasilnya lebih optimal.

Sebagai rekomendasi: (1) Bagi Pemerintah Desa menetapkan alokasi anggaran khusus pariwisata dalam APBDes secara proporsional;(2) Bagi Bumdes membentuk tim pemasaran digital dari pemuda desa dengan strategi konten yang konsisten di platform Instagram, TikTok, dan Google My Business; (3) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak ekonomi wisata secara lebih presisi, serta melakukan kajian komparatif antara Desa Wisata Brakseng dengan desa wisata yang berhasil di Kota Batu atau Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (1979). Public policy-making. Holt, Rinehart and Winston.

Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), 193–214.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). (2022). Strategi digitalisasi desa wisata: Panduan pengelolaan konten digital. BPOLBF.

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5–12.

Dunn, W. N. (1994). Public policy analysis: An introduction (2nd ed.). Prentice-Hall.

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone.

Haryanto, E. S. (2018). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 45–58.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Panduan pengembangan

BUMDes dalam pengelolaan desa wisata. Kementerian Desa PDTT.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2011). Pedoman umum pengembangan desa wisata. Kemenbudpar.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott, Foresman.

NORAD. (1999). The logical framework approach: A summary of the theory behind the LFA method. Norwegian Agency for Development Cooperation.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Peraturan Desa Sumberbrantas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pariwisata Desa Sumberbrantas.

Putra, I. N. D., & Suryani, N. L. P. (2019). Evaluasi program pariwisata desa wisata Kintamani Bali menggunakan Logical Framework Approach. Jurnal Pariwisata Terapan, 3(2), 101–115.

Ramadhan, A., Kurniawan, B., & Safitri, D. (2023). Evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 22–36.

Sari, D. A., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang berdasarkan dimensi evaluasi Dunn. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 24(1), 1–18.

Turner, L. (2003). Public–private partnerships in tourism development. Journal of Sustainable Tourism, 11(5), 345–360.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

USAID. (1973). Logical framework: Modifications based on experience. USAID.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Weaver, D. B. (2006). Sustainable tourism: Theory and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann.